POVERTY REDUCTION BEST PRACTICES IN BANYUWANGI REGENCY

Emi Hidayati [1], Fitriatul Masruroh[2]
[1]Institut Agama Islam (IAI)Ibrahimy Genteng, Banyuwangi, Indonesia e-mail: [1] emi@iaiibrahimy.ac.id, [2]fitriamasruroh448@gmail.com,

Abstract

The poverty reduction policy, which was marked by the issuance of various regulations, was responded by the Banyuwangi Regency Government through 6 regional regulations, 8 regent regulations, 29 regent decrees and 1 Regent circular. As well as various breakthrough programs spread across 14 OPDs (Regional Apparatus Organizations). The purpose of this study describes the variety of services as the government's commitment in the form of innovative poverty reduction policies and strategies through collaboration across Regional Apparatus Organizations and multistakeholders as stated in the Banyuwangi Regency Poverty Reduction Plan document 2021 – 2026. Data collection is carried out with in-depth interviews and documentation to obtain data. The collected data is then analyzed by discussing the theory of policy innovation and presented using a qualitative descriptive approach. The results of this study show that through the forms of innovative poverty reduction programs in Banyuwangi Regency, it can reduce the poverty rate from 20% in 2009 to 7.08% in 2021, the highest achievement in East Java.

Keywords : *Policy Innovation, Program Innovation, Poverty Reduction*

Abstrak

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan terbitnya beragam regulasi, direspon oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui 6 peraturan daerah, 8 peraturan bupati, 29 keputusan bupati dan 1 surat edaran Bupati. Serta beragam terobosan program yang tersebar di 14 OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tujuan penelitian ini mendeskripsikan ragam layanan sebagai komitmen pemerintah berupa inovasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan strategi melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan multistakeholder yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mendiskusikan teori inovasi kebijakan dan dipaparkan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui bentuk-bentuk program inovasi penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Banyuwangi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dari 20% pada tahun 2009 menjadi 7,08% pada tahun 2021 capaian tertinggi di Jawa Timur.

Keywords : *Inovasi Kebijakan, Inovasi Program, Penanggulangan Kemiskinan*

A. Pendahuluan

Perhatian para pemimpin lokal Kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak ditunjukkan dalam beragam bentuk kebijakan, sebagai respon atas kondisi kemiskinan global. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi.yang dengan gemilang mampu mendongkrak angka penurunan kemiskinan sebesar 0,9% yang sangat prestisus, mengalahkan kabupaten seluruh Indonesia. Artikel ini hendak mengkaji secara mendalam tentang beragam terobosan sebagai bentuk praktik baik atau inovasi program yang telah dijalankan. Meskipun telah banyak kajian-kajian sebelumnya seperti tantangan global dalam pengentasan kemiskinan (Bapna & Mathur, 2012).

Berbagai disiplin ilmu memiliki pemikiran dan pemahaman masing-masing tentang kemiskinan. Ekonomi berfokus pada kebutuhan dasar individu dari aspek pendapatan dan konsumsi, dan Sosiologi berfokus pada pengucilan sosial. Ekonomi institusional baru menghubungkan masalah kemiskinan dengan sistem atau institusi, dengan alasan bahwa sistem merupakan penentu kinerja ekonomi dan bahwa sistem yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori-teori klasik tentang kemiskinan atau anti-kemiskinan meliputi Lingkaran Setan Kemiskinan (Nurkse, 1952), Perangkap Ekuilibrium Tingkat Rendah (Nelson, 1956) dan lain sebagainya.

Artikel ini bermaksud memaparkan hasil kajian tentang inovasi kebijakan sebagai praktik baik dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Dimana tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 mencapai 20% 2015 hingga 2019 mengalami perkembangan yang semakin menurun yakni pada tahun 2015 mencapai angka 9.17 %. kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 yang mencapai 7.52 %. Akan tetapi pada tahun 2020 meningkat kembali yang mencapai sebesar 8.06%. Sejalan dengan presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tersebut maka disertai pula fluktuasi jumlah penduduk miskin. dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyuwangi sebesar 146.000 jiwa dan pada tahun 2019 turun mencapai 121.370 jiwa akantetapi pada tahun 2020 naik mencapai 130.370. dan secara mengejutkan pada tahun 2022 telah diumumkan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Banyuwangi mencapai 7,51% ditandai dengan penurunan jumlah penduduk miskin berkisar 122.010 dan garis kemiskinan Rp. 414,879.

Akan tetapi. tahun 2015 telah berlalu. maka berakhirlah salah satu program pembangunan dunia yang dikenal dengan Milenium Development Goals (MDG's). Sebagai gantinya maka diluncurkan suatu sistem pembangunan baru yang bernama Sustainable Development Goals (SDG's). Terdapat 17 kesepakatan dalam SDG's diantaranya adalah pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. maka "penghilangan kemiskinan dan kelaparan" hingga tahun 2030 menjadi tulang punggung dalam pencapaian tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain. kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDG's kembali menjadi tujuan dalam pencapaian program SDG's.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 96 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 terkait Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu isinya adalah penyempurnaan TKPK menjadi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Peraturan Presiden tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia. khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia. sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban menjamin kesejahteraan masyarakatnya melalui pendidikan dan juga pekerjaan yang layak. Sehingga. Kemiskinan menjadi perhatian dan tanggung jawab tidak hanya pemerintah pusat namun juga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

(Pratama, 2020) memandang inovasi sebagai sebuah konsepsi dan implementasi layanan baru yang signifikan. Inovasi itu sendiri adalah suatu ide atau cara untuk memperbaiki atau mereformasi kebijakan pemerintah yang telah ada dan melibatkan pengambilan risiko. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dijelaskan oleh (Walker, 1969) yang membatasi definisi mereka pada bagian

pertama dari definisi Glor yaitu "segala sesuatu yang dianggap baru di dalam organisasi". (Walker, 1969) mendefinisikan inovasi sebagai suatu program atau kebijakan baru yang diadopsi suatu negara, tanpa memperdulikan berapa lama program tersebut akan berjalan atau berapa banyak negara lain yang mengadopsinya. Glor menambahkan kualifikasi pengambilan risiko, penemuan dan adaptasi dini.

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS (Badan Pusat Statisktik) pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Semenjak itu, setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya terkait pangan dan gizi pada tahun 1978 seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari.

Menurut World Bank. dalam definisi kemiskinan adalah: ”The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy. creative life and enjoy a decent standard of living freedom. self esteem and the respect of other”. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. Kemiskinan sebagai suatu problema sosial telah merangsang kegiatan riset sebagai dasar untuk kebijakan pengentasan. Sudah ada berbagai kajian yang ditujukan untuk mengklasifikasikan orang miskin dan menganalisis penyebab kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith bahwa kemiskinan yang terjadi di negaranegara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut: a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah. dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat; b. Pendapatan perkapita negaranegara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat. bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi; c. Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata; d. Mayoritas penduduk di negara negara dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut; e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi, dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di

negara maju; f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Persoalan kemiskinan dapat dipahami lebih jauh dengan memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan Friedmann sebagai berikut:

1. Poverty Line

Tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial dan dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah berdasarkan income yang dua pertiganya digunakan untuk "keranjang pangan".

2. Absolute and Relative Poverty

Kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum yang tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan. Kemiskinan relatif sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan income relatif.

3. Deserving Poor

Kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang nonmiskin. Bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.

4. Target Population

Kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek. Kebijakan serta program pemerintah. berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan. anakanak. buruh tani yang tak punya lahan. petani tradisional kecil. korban perang dan wabah serta penghuni kampung kumuh.

Apabila kemiskinan dilihat dari penyebab kemiskinan itu sendiri dibedakan menjadi empat (4) meliputi :

1. Kemiskinan Individu

Kemiskinan individu adalah yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alami seseorang; misalnya cacat mental atau fisik. usia lanjut sehingga tidak mampu bekerja dan lain-lain.

2. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masalah alam; misalnya kondisi alam yang tidak bersahabat dengan daerah para penduduk sehingga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitasnya masingmasing.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan rendahnya kualitas SDM akibat kultur masyarakat tertentu; misalnya rasa malas. tidak produktif. Terlalu bergantung pada harta warisan. dan lain-lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan sistem pemerintahan suatu negara. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi. tetapi juga dimensi -dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi(Nanga, 2006).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) dimana datadatanya lebih banyak diperoleh dari dokumen- dokumen perencanaan aksi daerah tentang penanggulangan kemiskinan dan juga hasil wawancara dengan para pihak antara lain pihak swasta, organisasi non pemerintah seperti Baznas, LazizNU dan juga unsur pengusaha dan NGO yang bergerak dalam pendampingan isu-isu perempuan rentan dan anak. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh (Ikhsan, 1999) bahwa faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik produktif (physical productive capital), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal sumber daya manusia dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum. semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Variabel modal fisik produktif antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan. Khususnya untuk pertanian, kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif. rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga.

C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi perikanan dan pertanian. Potensi tersebut terdiri dari 31,72% dari hutan, persawahan sebesar 11,53%, perkebunan sebesar 14,21%, ladang sebesar 2,80%, 0,31% untuk tambak, dan 17,77% untuk

potensi lain-lainnnya. Kabupaten Banyuwangi juga menjadi kabupaten dengan kebutuhan infrastruktur paling luas se Jawa Timur. Infrastruktur itu menyebar di 24 kecamatan yang terdiri dari 189 desa dan 28 kelurahan. Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sebesar 175,8 Km^2 Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebesar 1.599.811 jiwa. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangu pada tahun 2009 sebesar 20,09%

Penanganan kemiskinan dengan menggunakan indikator kondisi lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui OPD-OPDnya selalu berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuat program-program bantuan kepada masyarakat miskin. Sasaran dari program-program tersebut mengacu pada 6 point (kondisi rumah dan sanitasi).

1. Jenis dinding kayu dan bambu
2. Penerangan listrik
3. Jenis lantai tanah
4. Atap rumah non genteng
5. Sumber air minum tak terlindungi
6. Tidak memiliki jamban pribadi

Dalam melaksanakan upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan slogan atau bisa disebut kata kunci dalam setiap intervensinya. Kata kuncinya adalah 3K, yaitu 'Komunikasi, Koordinasi. Agar penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi dapat diimplementasikan dengan efektif dan berdampak luas, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangu juga menggunakan strategi gotong royong semua sektor. Strategi tersebut melibatkan beberapa sektor diluar pemerintahan seperti, LSM, perguruan tinggi, swasta/BUMN, TNI/POLRI, ormas, tokoh masyarakat, dan sektor-sektor lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga membentuk klaster penanggulangan kemiskinan agar nantinya intervensi yang dilakukan kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan beban sasaran, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Klaster-klasternya dibagi menjadi 3, yaitu Klaster I : Perlindungan dan Bantuan Sosial, Klaster II : Pemberdayaan Masyarakat, dan Klaster III : UMKM. Pembiayaan program pembangunan dalam hal ini juga merupakan bagian penting dalam perancangan intervensi penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu dibuat strategi pembiayaan program agar nantinya hasil dari intervensi penanggulangan kemiskinan menjadi lebih efektif.

Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 sebesar Rp. 155,05 M. Jumlah ini memiliki peningkatan dibandingkan pada tahun 2011 yang sebesar Rp. 21,07 M. penanggulangan kemiskinan

membutuhkan kolaborasi dari semua sektor, maka perlu adanya tim/kelembagaan yang khusus dibentuk untuk fokus mengatur semua kebijakan yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri sudah terbentuk TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang berada pada tingkat kabupaten dan kecamatan dan 217 SATGAS PK (Penanggulangan Kemiskinan). Semua kelembagaan tersebut memiliki peran sendiri-sendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk menanggulangi kemiskinan daerah di Kabupaten Banyuwangi, para OPD terkait juga mencanangkan beberapa program inovasi sebagai percepatan dalam penanggulangan kemiskinan yang ada. Berikut program inovasi dari beberapa OPD. Dinas Pendidikan dalam hal ini pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran pendidikan seoptimal mungkin melalui tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Garda Ampuh program ini dilatar belakangi oleh tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, ditinggal orang tua, serta kawin muda, Pemkab Banyuwangi kembali melanjutkan sejumlah program khusus untuk para pelajar dari keluarga kurang mampu, mulai pemberian uang saku dan uang transportasi tiap hari hingga tabungan kepada pelajar, Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan perluasan akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dalam hal ini ditandai dengan adanya Program Harapan Keluarga Peduli Anak Sejak Dini dll. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana terus melakukan inovasi program dalam menanggulangi kemiskinan daerah yang diantaranya berupa Rantang kasih, Rumah Singgah dan SPM online. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka percepatan perluasan akses masyarakat untuk memperoleh layanan keberdayaan dalam hal ini ditandai dengan adanya Festival bedah rumah, Transmigrasi dan Perindustrian juga turut melakukan beberapa inovasi guna untuk mempercepat gerakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan cara menekan angka pengangguran yang ada, job fair dsb. Dan beberapa OPD lainnya yang ada di Kab Banyuwangi.

D. Simpulan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditandai dengan terbitnya beragam regulasi, direspon oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui 6 peraturan daerah, 8 peraturan bupati, 29 keputusan bupati dan 1 surat edaran Bupati. Penanganan kemiskinan dengan menggunakan indikator kondisi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui OPD-OPDnya selalu berupaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan membuat program-program bantuan kepada masyarakat miskin. Sasaran dari program-program tersebut mengacu pada 6 point (kondisi rumah dan

sanitasi) diantaranya ialah Jenis dinding kayu dan bambu, Penerangan listrik, Jenis lantai tanah, Atap rumah non genteng, Sumber air minum tak terlindungi dan tidak memiliki jamban pribadi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mendiskusikan teori inovasi kebijakan dan dipaparkan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Daftar Rujukan

Bapna, I. B., & Mathur, N. (2012). Application of fractional calculus in statistics. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 7(17–20), 849– 856.

Ikhsan, M. (1999). The Disaggregation of Indonesian poverty: Policy and analysis. University of Illinois at Urbana-Champaign.

Nanga, M. (2006). Dampak transfer fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia: suatu analisis simulasi kebijakan.

Nelson, R. R. (1956). A theory of the low-level equilibrium trap in underdeveloped economies. The American Economic Review, 46(5), 894–908.

Nurkse, R. (1952). Some international aspects of the problem of economic development. The American Economic Review, 42(2), 571–583.

Pratama, R. P. (2020). Determinan yang Mempengaruhi Program Inovasi Gerai Cepat Dukcapil (Gercep Dukcapil) di Kabupaten Bekasi. Journal of Public Policy and Applied Administration, 2(1).

Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.

Walker, J. L. (1969). The diffusion of innovations among the American states. American Political Science Review, 63(3), 880–899.